

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang digunakan untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai perbandingan dari hasil penelitiannya. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KAB. Luwu Utara (Studi Kasus UMKM Farhan Cake's). Rizki Asrinda Handayani (2018)	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan pada UMKM Farhan Cake's masih secara manual dan sederhana. Faktor yang menyebabkan gagalnya implementasi SAK EMKM adalah karena kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, serta kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan.
2.	Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora). Ahmad Sholikin & Ade Setiawan (2018).	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Rumah Mode Een Productions dan Kanaya Konveksi dinilai tidak siap dalam mengaplikasikan SAK EMKM karena kedua UMKM tersebut tidak mengetahui adanya standar baru bagi UMKM dan mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang memahami penyusunan laporan keuangan.

Dilanjutkan

Lanjutan

3.	Implementasi SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda Community. Ivana Nina Esterlin Barus, Andi Indrawaty, dan Danna Solihin (2018)	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Berdasarkan pengamatan terhadap 33 UMKM. Didapat hasil bahwa terdapat; 2 UMKM yang menyelenggarakan catatan akuntansi secara manual. Selebihnya, 8 UMKM telah melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan memakai software.
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan) Ni Komang Ismadewi, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja (2017)	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Penyusunan laporan keuangan pada Usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa hanya menyusun catatan keuangan dilakukan dengan sederhana berdasarkan pengetahuan dari pemilik usaha catatan tersebut hanya meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan neraca.
5.	Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Jewelry S Celuk Sukawati. Made Dana Saputra, I Made Agus Putrayasa (2020)	Penyusunan Laporan Keuangan	Deskriptif Komparatif	Pada pengakuan dan pengukuran akun-akun aset, liabilitas dan ekuitas yang dicatat oleh usaha ini sudah sesuai dengan SAK EMKM, namun pada penyajian dan pelaporan atas akun-akun tersebut masih belum sesuai dengan SAK EMKM, dikarenakan belum adanya laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan

Dilanjutkan

Lanjutan

6.	The Implementation of SAK EMKM on UMKM Financial Reports(Case Study of Cibuntu Tofu UMKM, Bandung) Nopi Hernawati, Ririn Sri Kuntorini, Irena Paramita Pramono (2019)	Analysis Of Accounting System Formulation	Qualitative	Financial statement of UMKM Cibuntu Tofu is compiled by the researchers based on SAK EMKM. Notes to the financial statements present a general description of the company, statements that the compilation of the report uses SAK EMKM as the basis of compilation, as well as the accounting policies applied in the financial instruments presented in the financial statements of the UMKM Cibuntu Tofu.
----	---	---	-------------	---

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizki Asrinda Handayani (2018) adalah terletak pada fokus penelitiannya yakni tentang analisis laporan keuangan yang ada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditinjau berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis perusahaan (objek) yang akan diteliti dan juga tahun penelitian. Pada penelitian ini perusahaan (objek) yang akan diteliti adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Histlalova yang difokuskan pada laporan keuangan tahun 2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditujukan pada entitas kecil dan menengah. Namun standar ini dirasa kurang sederhana jika diaplikasikan pada entitas mikro kecil dan menengah, maka kemudian DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi yang lebih sederhana dan mudah difahami oleh entitas mikro kecil, standar ini disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini mulai diberlakukan per tanggal 1 januari 2018. Dalam SAK EMKM terdapat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. SAK ETAP sendiri merupakan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun entitas ini menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaannya. Sedangkan SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Didalam laporan keuangan SAK EMKM hanya memuat tiga komponen yaitu; neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, dasar pengukuran unsur-unsur

laporan keuangan hanya dilakukan berdasarkan biaya historis, tidak ada pengukuran pengakuan penurunan nilai kecuali untuk bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan regulator terkait.

Dijelaskan dalam SAK EMKM (2016), bahwa penerbitan SAK EMKM ini menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan pada entitas mikro kecil yang bergerak diberbagai jenis usaha. Didalamnya juga terdapat Contoh Ilustratif dan Dasar Kesimpulan (DK) untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memahami standar akuntansi. Penerbitan SAK EMKM diharapkan mampu membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyusun laporan keuangan, hal ini akan memudahkan pelaku Usaha untuk mendapatkan akses pendanaan.

SAK EMKM diterbitkan dengan tujuan agar semua unit usaha mampu menyusun laporan keuangan sesuai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Karena setiap perusahaan menginginkan agar usahanya terus berkembang, maka harus melakukan berbagai upaya demi tercapainya usaha yang lebih baik disetiap periodenya. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah meyakinkan publik bahwa usaha yang sedang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan dengan adanya proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai

dengan standar yang telah ditentukan. Hal itu dimaksudkan untuk membantu manajemen perusahaan dalam memperoleh berbagai kemudahan, misalnya; untuk membuat keputusan atas kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dikhususkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Adapun entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas ini menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum financial bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, investor, saham, dll. Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal dan entitas ini menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2.2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan adalah Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan, seperti; pemegang saham, kreditur, serikat pekerja,, badan pemerintah, dan manajemen. Kartikahadi, dkk. (2016:12).

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2017). Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2018:3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Adapun pengguna tersebut ialah penyedia sumberdaya bagi entitas, seperti kreditur maupunn investor.

Adapun jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan keuangan yang didalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Adapun pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan adalah; a) kas dan setara kas, b)

piutang, c) persediaan, d) aset tetap, e) utang usaha, f) utang bank, dan g) ekuitas. Tidak ada ketentuan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Namun, penyajian pos-pos aset entitas dapat diurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2. Laporan laba rugi selama periode

Menurut SAK EMKM (2016:11), laporan laba rugi merupakan gambaran atas kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Dalam laporan laba rugi disediakan Informasi tentang kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Pos-pos yang termasuk dalam laporan laba rugi entitas adalah: a) pendapatan, b) beban keuangan, dan c) beban pajak.

3. Catatan atas laporan keuangan

Menurut SAK EMKM (2016:13), Catatan atas laporan keuangan berisi tentang pernyataan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan, dan rincian atas pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi

tambahan dan berbagai rincian yang disajikan tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan akan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2018:7), Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pada pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan dibutuhkan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Relevan

Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa

masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasinya di masa lalu.

2. Representasi tepat

Informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi dipandang bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*).

3. Keterbandingan

Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengavaluasi posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat

membandingkan laporan keuangan entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antarperiode untuk entitas tersebut, dan untuk entitas yang berbeda.

4. Keterpahaman

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK EMKM harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK EMKM kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK EMKM.

2.2.4 Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang akan digunakan untuk mengukur aset, kewajiban dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum dilakukan adalah biaya historis dan nilai wajar.

1) Biaya historis

Aset dicatat sebesar biaya pengeluaran yang kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima dari penukar kewajiban sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2) Nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.2.5 Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut mengatur tentang: 1) Usaha mikro adalah ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan standar usaha mikro yang ditetapkan dalam undang-undang. 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang

secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk usaha kecil. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah hasil penjualan tahunan atau total kekayaan bersih yang lebih besar jika dibandingkan dengan usaha menengah, baik usaha nasional atau swasta milik negara, usaha patungan atau usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Di dalam Undang-undang tersebut pada pasal 6 dijelaskan tentang kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM, kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan dengan hasil penjualan tahunan paling besar dengan nilai Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah unit usaha yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta hingga maksimum Rp. 2,5 milyar.
- c. Usaha menengah adalah unit usaha yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar hingga maksimum Rp. 50 milyar.

Tabel 2.2
Kriteria UMKM dari segi moneter

No	Jenis Usaha	Kriteria	Kriteria
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 juta	Maksimal Rp. 300 juta
2.	Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 juta – Rp. 500 juta	Lebih dari Rp. 300 juta – Rp. 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 10 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 milyar – Rp. 50 Milyar

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), aset merupakan sumberdaya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Sedangkan omzet merupakan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan, baik barang ataupun jasa. Pendapatan ini belum dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP) dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan.

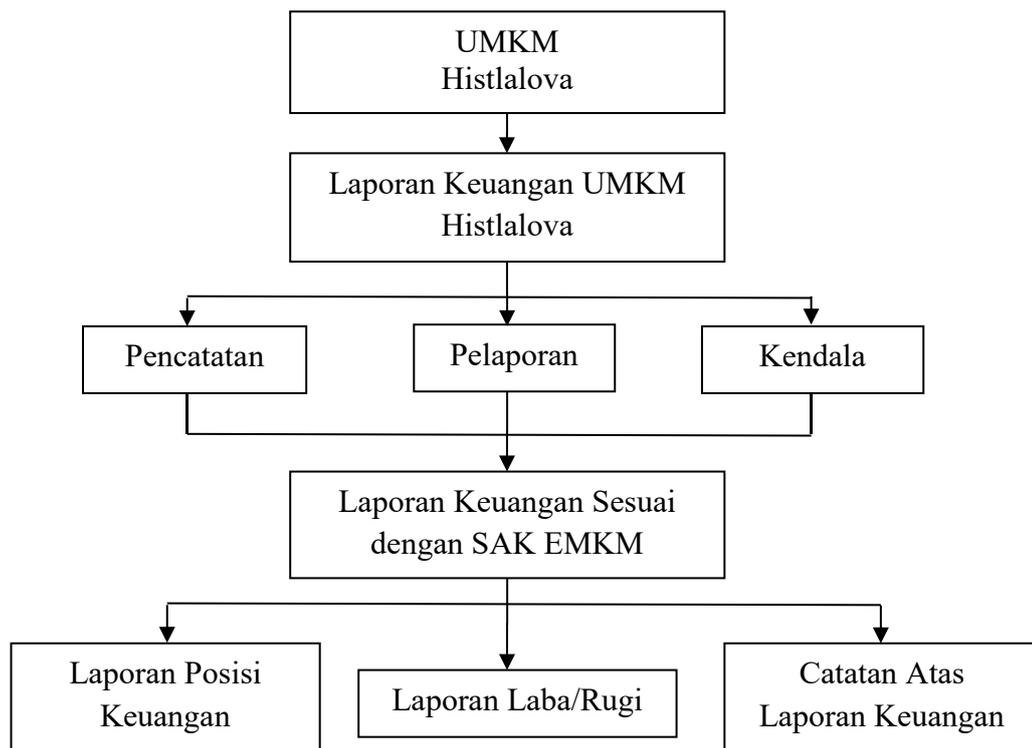
2.2.6 Kendala UMKM

Dalam perkembangannya UMKM tidak selalu berjalan lancar sesuai harapan pemilik atau pengelolanya, banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, diantaranya dalam hal perizinan, sumber daya manusia, promosi dan pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi

oleh UMKM antara lain latar belakang pendidikan yang tidak mengenal/ memahami tentang akuntansi, kurang disiplin dalam pelaksanaan pembukuan, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan ataupun membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi. Sebahagian besar UMKM akan menyusun laporan keuangan usahanya apabila mereka memerlukan sesuatu yang salah satu syaratnya berkaitan dengan laporan keuangan, misalnya persyaratan untuk meminjam ke Bank.

2.2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : (peneliti 2021)

Dari gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai dengan memilih objek Usaha Mikro Kecil dan Menengah Histlalova sebagai objek penelitian. Setelah objek penelitian ditentukan kemudian penulis akan menganalisis tentang penerapan akuntansi seperti pencatatan dan juga pelaporan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM tersebut. Pada proses analisis tersebut juga dikaji kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pencatatan laporan keuangan usaha tersebut. Dari laporan keuangan yang disajikan oleh UMKM tersebut, peneliti akan berusaha menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dari data transaksi yang disajikan oleh UMKM Histlalova, peneliti akan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).